

## OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA BOS DAN BOP DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

Oleh:

Sri Ningsih<sup>1</sup>

Ajeng Niken Hapsari<sup>2</sup>

Universitas Negeri Semarang

Alamat: JL. Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah (50229).

Korespondensi Penulis: [ririn0802@students.unnes.ac.id](mailto:ririn0802@students.unnes.ac.id),

[ajengniken307@students.unnes.ac.id](mailto:ajengniken307@students.unnes.ac.id).

**Abstract.** *The strategy for optimizing education financing is a crucial aspect in supporting the continuity of the teaching and learning process, especially in public schools that heavily rely on government funding. This study explores the management practices of BOS (School Operational Assistance) and BOP (Operational Assistance for Education Units) funds at SMA Negeri 12 Semarang within the context of daily educational operations. The use of BOS funds focuses on the provision of infrastructure, learning activities, and teacher training, while BOP funds are specifically allocated for the remuneration of non-permanent teachers. Data were collected through in-depth interviews with fund managers, financial report documentation, and observations of online reporting systems. The findings reveal that the integration of these two funding schemes improves budget efficiency, although challenges remain in terms of fund flexibility and limited external support. Transparent reporting through ARKAS and SIMDAK BOP applications, along with the involvement of the school committee, strengthens accountability. This study provides a real-world depiction of adaptive school financial governance practices in response to operational needs and policy changes, while also open up opportunities for innovation in education financing at the school level.*

**Keywords:** *Accountability, Operational Assistance, Budget Efficiency, Education Financing, Optimization Strategy, Transparency.*

# **OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA BOS DAN BOP DI SMA NEGERI 12 SEMARANG**

**Abstrak.** Strategi optimalisasi pembiayaan pendidikan menjadi aspek krusial dalam mendukung keberlangsungan proses belajar-mengajar, terutama di sekolah negeri yang sangat bergantung pada pendanaan pemerintah. Studi ini mengeksplorasi praktik pengelolaan dana BOS dan BOP di SMA Negeri 12 Semarang dalam konteks operasional pendidikan sehari-hari. Pemanfaatan dana BOS difokuskan pada pengadaan sarana prasarana, pembelajaran, dan pelatihan guru, sementara dana BOP digunakan khusus untuk membiayai honorarium guru tidak tetap. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola dana, dokumentasi laporan keuangan, dan observasi sistem pelaporan daring. Temuan menunjukkan bahwa integrasi pengelolaan dua skema dana ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, meskipun masih dihadapkan pada tantangan fleksibilitas dana dan keterbatasan dukungan eksternal. Proses pelaporan yang transparan melalui aplikasi ARKAS dan SIMDAK BOP serta keterlibatan komite sekolah memperkuat akuntabilitas. Studi ini menawarkan gambaran nyata tentang praktik tata kelola keuangan sekolah yang adaptif terhadap kebutuhan operasional dan perubahan kebijakan, sekaligus membuka ruang inovasi dalam pembiayaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Bantuan Operasional, Efisiensi Anggaran, Pembiayaan Pendidikan, Strategi Optimalisasi, Transparan.

## **LATAR BELAKANG**

Permasalahan pembiayaan pendidikan menjadi salah satu isu utama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah telah mengalokasikan dana bantuan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Kedua bentuk bantuan ini diberikan kepada satuan pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan operasional dasar, termasuk pengadaan alat tulis, sarana prasarana, hingga honorarium guru. Namun, dalam praktik pelaksanaannya di tingkat sekolah, penggunaan dana BOS dan BOP tidak selalu berjalan optimal karena berbagai kendala administratif, teknis, maupun strategis. Analisis terhadap tata kelola kedua jenis dana ini sangat penting untuk menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung kegiatan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan menengah, SMA Negeri 12 Semarang merupakan salah satu satuan pendidikan yang aktif menerima dan memanfaatkan dana BOS dan BOP. Sekolah ini menjadi contoh relevan untuk melihat bagaimana strategi pengelolaan keuangan dilakukan secara konkret dalam menjawab berbagai tantangan pembiayaan. Optimalisasi penggunaan dana sangat penting, mengingat sekolah tidak memungut iuran dari siswa dan bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah. Kondisi ini mendorong perlunya perencanaan, pelaporan, dan evaluasi dana yang efektif agar tujuan pendidikan tetap dapat tercapai. Melalui studi kasus ini, diharapkan diperoleh gambaran nyata tentang praktik terbaik dalam mengelola dana BOS dan BOP secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas proses belajar-mengajar di satuan pendidikan. Di Indonesia, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebagai upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. BOS ditujukan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah secara umum, sedangkan BOP lebih difokuskan untuk pembiayaan tenaga pendidik non-ASN.

Meskipun memiliki tujuan yang jelas, pelaksanaan kedua skema dana ini masih menghadapi tantangan di tingkat pelaksana, terutama dalam aspek efisiensi, akuntabilitas, dan keterbatasan fleksibilitas. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang adaptif sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah. SMA Negeri 12 Semarang menjadi salah satu contoh sekolah negeri yang menerima dana BOS dan BOP secara rutin setiap tahun ajaran. Penggunaan dana BOS di sekolah ini meliputi pengadaan alat tulis kantor, listrik, internet, pelatihan guru, dan kegiatan pembelajaran. Dana BOP difokuskan pada honorarium guru tidak tetap yang menjadi bagian penting dari proses belajar-mengajar namun tidak termasuk dalam daftar pegawai negeri. Sekolah ini tidak memungut biaya pendidikan dari siswa, sehingga seluruh pembiayaan bersumber dari pemerintah. Kondisi ini menuntut pengelolaan dana secara efisien dan akuntabel. Berdasarkan wawancara dengan bendahara sekolah, dana BOS yang diterima sekolah mencapai sekitar Rp1,2 miliar per tahun. Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap dan diatur melalui sistem digital bernama ARKAS yang disediakan Kementerian Pendidikan.

Penyusunan anggaran dilakukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara kolektif dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas. Evaluasi

## **OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA BOS DAN BOP DI SMA NEGERI 12 SEMARANG**

penggunaan dana dilakukan secara berkala melalui rapat manajemen dan disupervisi oleh pihak Dinas Pendidikan. Proses ini memastikan bahwa dana digunakan secara tepat guna dan sesuai perencanaan. Sementara itu, pengelolaan dana BOP dilakukan berdasarkan regulasi dari pemerintah daerah dan dilaporkan melalui aplikasi SIMDAK BOP. Dana ini hanya dapat digunakan untuk pembayaran gaji guru honorer dan tenaga pendidik non-ASN. Ketatnya aturan penggunaan dana BOP membuat sekolah tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain seperti pengadaan alat pembelajaran atau kegiatan siswa. Sekolah juga tidak menerima bantuan dari pihak swasta atau CSR perusahaan, sehingga pendanaan sangat terbatas. Keterbatasan ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan program sekolah yang bersifat inovatif dan kreatif.

Tim manajemen sekolah, termasuk kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite, bekerja sama dalam merancang strategi alokasi dana secara kolektif. Diskusi dilakukan untuk menetapkan kebutuhan utama yang didanai dari BOS maupun BOP. Transparansi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran, yang juga diperkuat dengan dokumentasi resmi dan laporan daring. Selain itu, pihak sekolah juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui rapat komite dan papan pengumuman anggaran. Upaya ini dilakukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan. Kendala terbesar dalam pelaksanaan BOS dan BOP adalah tidak sinkronnya jumlah dana dengan kebutuhan riil sekolah. Beberapa program pengembangan seperti pelatihan berbasis digital dan peningkatan literasi siswa tidak didanai sepenuhnya. Sekolah harus melakukan efisiensi, bahkan menunda beberapa rencana kegiatan karena keterbatasan. Ketika pencairan dana terlambat, sekolah mengandalkan dana kas kecil atau dukungan dari komite. Situasi ini menjadi tantangan rutin yang dihadapi manajemen sekolah.

Sekolah perlu menyusun strategi pembiayaan jangka panjang yang mandiri dan berkelanjutan. Ketergantungan pada dana BOS dan BOP semata membuat sekolah rawan terhadap perubahan regulasi. Alternatif solusi dapat ditempuh melalui kemitraan dengan alumni atau komunitas lokal. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan pengalaman eksternal masih menjadi tantangan. Untuk mengatasi ini, peningkatan kapasitas manajerial dan komunikasi sangat diperlukan. Hal ini agar sekolah mampu menjalin relasi strategis di luar instansi. SMA Negeri 12 Semarang dinilai cukup baik dalam pengelolaan dana BOS dan BOP. Proses pelaporan dilakukan secara daring dan tepat waktu. Verifikasi oleh dinas pendidikan menjadi syarat pencairan tahap selanjutnya. Dokumentasi bukti

transaksi disimpan dengan rapi sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Transparansi ini memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik. Akuntabilitas menjadi fondasi tata kelola keuangan pendidikan yang sehat.

Secara teknis, pencairan dana mengikuti prosedur nasional berbasis aplikasi dan digital. Dana BOS mengacu pada RKAS yang disusun melalui ARKAS, sedangkan dana BOP berdasarkan jumlah siswa. Aplikasi ini membantu percepatan pelaporan dan meminimalkan terjadinya kesalahan administratif. Namun, masih banyak operator sekolah yang belum mahir menggunakan teknologi tersebut. Rendahnya literasi digital akan menghambat efisiensi pengelolaan dana. Oleh karena itu, pelatihan teknis harus dilakukan secara rutin. Selain teknis, faktor kepemimpinan juga sangat memengaruhi keberhasilan pengelolaan dana. Kepala sekolah yang partisipatif mendorong keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Budaya kerja kolaboratif menghasilkan transparansi dan efisiensi. Komite sekolah berperan penting sebagai pengawas eksternal. Evaluasi berkala memperkuat akuntabilitas lembaga. Kombinasi antara sistem, SDM, dan kepemimpinan adalah kunci keberhasilan pengelolaan dana.

SMA Negeri 12 Semarang menunjukkan praktik baik dalam menyesuaikan anggaran sesuai kebutuhan lokal. Penyesuaian ini dilakukan tanpa melanggar ketentuan pusat. Evaluasi internal dan eksternal dijalankan secara berkala. Informasi penggunaan dana dipublikasikan secara terbuka melalui papan informasi dan rapat komite. Transparansi seperti ini membangun kepercayaan masyarakat. Penelitian terhadap praktik ini penting sebagai dokumentasi kebijakan. Temuan lapangan dapat menjadi sumber bahan refleksi dan evaluasi oleh pemerintah. Model pengelolaan yang baik bisa diadaptasi oleh sekolah-sekolah lain. Pemerintah juga dapat memperbaiki sistem pelaporan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Akuntabilitas harus menjadi sebuah nilai utama dalam tata kelola dana publik. Upaya optimalisasi pembiayaan pendidikan harus terus diperkuat. Hal ini demi menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Evaluasi terhadap efektivitas dana BOS dan BOP perlu difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap administrasi, tetapi juga terhadap output pendidikan terutama ketercapaian pembelajaran. Dana seharusnya diarahkan pada kebutuhan nyata siswa dan guru. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak sesuai rencana. Keterbatasan perencanaan menjadi hambatan utama. Evaluasi berkelanjutan menjadi kebutuhan mutlak. Faktor sosial dan geografis

## **OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA BOS DAN BOP DI SMA NEGERI 12 SEMARANG**

juga memengaruhi strategi penggunaan dana. SMA Negeri 12 berada di kawasan perkotaan dengan latar belakang ekonomi siswa yang beragam. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus kontekstual. Pendekatan seragam tidak lagi relevan dalam kebijakan pendidikan. Keuangan sekolah harus dikelola secara inklusif dan adaptif. Tujuan akhirnya adalah efisiensi dan pemerataan akses pendidikan.

Transparansi informasi publik menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Publikasi laporan dana harus dibarengi edukasi kepada wali murid agar tidak terjadi miskomunikasi. Sayangnya, belum semua pihak memahami mekanisme anggaran secara utuh. Sosialisasi dan komunikasi dua arah perlu ditingkatkan. Aplikasi seperti ARKAS dan SIMDAK BOP membantu pelaporan lebih tertata. Namun, tidak semua operator memiliki kompetensi teknis memadai. Ketimpangan pelatihan membuat proses input data rawan kesalahan. Pergantian sistem yang mendadak pun kerap membingungkan pihak sekolah. Pendampingan teknis rutin diperlukan sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, interpretasi yang kaku terhadap regulasi sering membuat sekolah ragu bertindak. Akibatnya, banyak program penting tertunda karena kekhawatiran audit. Sekolah perlu diberi ruang fleksibilitas yang proporsional untuk berinovasi. Dengan ruang fleksibilitas yang tepat, sekolah dapat lebih leluasa menyesuaikan program dengan kebutuhan siswa. Hal ini akan mendorong inovasi sekaligus menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.

### **KAJIAN TEORITIS**

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek strategis dalam menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu teori yang relevan untuk memahami efektivitas pembiayaan pendidikan adalah Teori Alokasi Sumber Daya (*Resource Allocation Theory*). Teori ini menekankan bahwa efektivitas suatu lembaga sangat tergantung pada cara lembaga tersebut mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan. Dalam konteks sekolah, pengalokasian dana seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) harus diarahkan untuk mendukung proses belajar-mengajar secara optimal. Teori ini menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan prioritas dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan utama dalam mengkaji bagaimana pengelolaan dana BOS dan BOP dilakukan di tingkat sekolah. Tak hanya itu teori Manajemen

Strategis Pendidikan juga dapat digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menilai bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan. Teori ini mengintegrasikan unsur visi, misi, dan tujuan pendidikan dengan kebijakan manajerial untuk mencapai keunggulan lembaga pendidikan. Optimalisasi BOS dan BOP tidak hanya dilihat dari pencapaian *output* keuangan, tetapi juga dari capaian mutu layanan pendidikan. Sekolah yang mampu mengelola dana secara strategis akan lebih siap menghadapi perubahan kurikulum, kebutuhan siswa yang beragam, serta tantangan teknologi dan sosial. Dengan demikian, manajemen strategis dalam pendidikan menjadi bagian integral dalam efektivitas pembiayaan. Teori ini memperkuat pendekatan sistemik dan berorientasi pada hasil dalam pengelolaan dana sekolah.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan dana BOS dan BOP masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian oleh Suharti (2018) menyatakan bahwa meskipun dana BOS telah membantu meringankan beban operasional sekolah, pelaporannya masih rumit dan menyita waktu. Kemudian, studi dari Wijayanti dan Arifin (2019) mengungkapkan bahwa beberapa sekolah belum sepenuhnya memanfaatkan dana BOS untuk peningkatan mutu pembelajaran, melainkan hanya untuk kebutuhan administratif. Penelitian oleh Kurniawan (2021) menemukan bahwa kualitas SDM pengelola anggaran menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi dana BOS dan BOP. Hal ini diperkuat oleh temuan Daryanto dan Sari (2022) yang menunjukkan adanya hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Hasil-hasil ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas manajemen dan sistem monitoring dalam pengelolaan dana BOS dan BOP. Dari sisi regulasi, Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler menekankan transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas sebagai prinsip utama penggunaan dana. Namun dalam praktiknya, prinsip fleksibilitas masih sering berbenturan dengan kekakuan birokrasi di tingkat pelaporan. Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Pendidikan untuk SMA Negeri di wilayah provinsi menegaskan bahwa dana BOP digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan penunjang lainnya. Dalam konteks ini, setiap sekolah memiliki tantangan tersendiri dalam menyelaraskan juknis pusat dan daerah dengan kebutuhan riil di sekolah. Penting untuk menilai efektivitas implementasi aturan

## **OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA BOS DAN BOP DI SMA NEGERI 12 SEMARANG**

ini berdasarkan kondisi sekolah masing-masing. Ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dan aturan kadang menjadi sumber inefisiensi penggunaan anggaran.

Sejalan dengan teori dan temuan penelitian terdahulu, studi ini berupaya menjawab pertanyaan: sejauh mana optimalisasi dana BOS dan BOP dapat mendukung kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 12 Semarang? Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada dugaan sementara bahwa efektivitas pengelolaan dana sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial sekolah, kualitas perencanaan anggaran, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, penelitian ini akan menguji sejauh mana dana BOS dan BOP telah digunakan sesuai tujuan dan menghasilkan dampak nyata terhadap proses pendidikan. Selain itu, aspek keterbukaan informasi dan transparansi publik juga menjadi variabel penting dalam menciptakan pengelolaan dana yang sehat. Oleh sebab itu, pendekatan studi kasus mendalam akan digunakan untuk menggali proses, tantangan, dan strategi dalam pengelolaan BOS dan BOP. Berdasarkan landasan teori dan studi terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H1:** Pengelolaan dana BOS dan BOP secara optimal berpengaruh positif terhadap kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 12 Semarang.

**H2:** Kapasitas manajerial kepala sekolah dan tim keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan dana BOS dan BOP.

**H3:** Transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan memiliki korelasi positif terhadap efisiensi penggunaan dana pendidikan.

**H4:** Kendala dalam implementasi juknis menyebabkan ketidaksesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan aktual sekolah.

Keempat hipotesis ini akan dijabarkan dalam bab-bab selanjutnya melalui metode studi kasus kualitatif. Penelitian akan menggali data primer melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di lingkungan SMA Negeri 12 Semarang. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola pengelolaan anggaran yang efektif dan strategi perbaikan yang aplikatif. Temuan ini tidak hanya bermanfaat bagi sekolah yang menjadi subjek, tetapi juga dapat menjadi masukan kebijakan bagi Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dalam mengembangkan pemahaman mengenai praktik pembiayaan pendidikan di tingkat satuan

pendidikan. Oleh karena itu, tinjauan pustaka dan hipotesis ini menjadi pondasi awal dalam menjawab persoalan optimalisasi dana pendidikan di sekolah negeri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan dana BOS dan BOP di SMA Negeri 12 Semarang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan praktik secara holistik dalam konteks nyata, sebagaimana dijelaskan Creswell (2016), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna dari perspektif subjek dalam konteks sosial tertentu. Studi kasus digunakan karena sesuai untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" dalam konteks fenomena yang masih berlangsung dan belum memiliki batas yang jelas antara fenomena dan konteksnya (Yin, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menggali data faktual, tetapi juga berupaya membangun pemahaman mendalam tentang strategi optimalisasi pembiayaan pendidikan, efektivitas sistem pelaporan, serta peran pemangku kepentingan dalam menciptakan akuntabilitas keuangan sekolah. Fokus pada konteks SMA Negeri 12 Semarang juga selaras dengan prinsip kontekstualisasi data dalam studi kasus.

Partisipan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini, informan utama meliputi bendahara BOS, kepala sekolah, serta pengelola keuangan BOP, karena mereka memiliki pengetahuan mendalam dan otoritas terhadap seluruh tahapan pengelolaan dana. Wawancara mendalam dilakukan sebagai instrumen utama pengumpulan data, didukung oleh studi dokumentasi atas laporan keuangan, RKAS, dan data dari aplikasi ARKAS dan SIMDAK BOP. Instrumen wawancara disusun dalam bentuk panduan semi-terstruktur, sehingga memungkinkan fleksibilitas peneliti untuk menggali informasi yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas dalam pengumpulan data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (2007), yang menekankan dalam penelitian sosial, interaksi antara peneliti dan informan sering membuka ruang untuk penggalian data yang lebih kaya.

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, sebagaimana dipaparkan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data

## OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA BOS DAN BOP DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

dilakukan untuk menyaring informasi penting yang berkaitan dengan efektivitas perencanaan, kendala implementasi, strategi pengelolaan, dan akuntabilitas dana BOS dan BOP. Setelah itu, data dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan secara naratif dengan memasukkan kutipan wawancara yang representatif dan diperkuat oleh bukti dokumentasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mempertimbangkan hubungan antara data empiris dengan teori-teori yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Validasi data dilakukan melalui cara triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan. Teknik ini sejalan dengan rekomendasi Lincoln dan Guba (1985) tentang *trustworthiness* dalam penelitian kualitatif.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada prinsip *input-process-output* dalam tata kelola pendidikan, yang diperkuat oleh teori alokasi sumber daya (Resource Allocation Theory). Dalam konteks ini, perencanaan dana melalui RKAS dipandang sebagai proses input, pelaksanaan penggunaan dana sebagai proses, dan hasil terhadap mutu layanan pendidikan sebagai output. Setiap tahap dianalisis dalam kaitannya dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana dipertegas dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2022. Selain itu, model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) juga digunakan untuk melihat keseluruhan proses pengelolaan keuangan, dari konteks kebutuhan sekolah, input berupa dana BOS dan BOP, proses penggunaan dan pelaporan, hingga dampaknya terhadap layanan pendidikan di sekolah. Pendekatan sistemik ini mendukung pemahaman bahwa pengelolaan dana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan berorientasi pada hasil.

Rentang waktu pelaksanaan penelitian ini adalah Mei 2025, yang mencakup proses pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 12 Semarang yang merupakan sekolah negeri di kota besar dengan karakteristik urban, sehingga memungkinkan ditemukan praktik manajerial keuangan yang cukup kompleks dan terstruktur. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam melihat praktik pengelolaan keuangan pendidikan secara mikro, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur akademik. Selain itu, pendekatan studi kasus yang digunakan memungkinkan temuan ini relevan untuk dijadikan model praktik bagi sekolah lain dengan kondisi serupa. Implikasi teoritis dari

penelitian ini adalah penguatan model pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas publik, sementara secara praktis menjadi masukan strategis bagi dinas pendidikan dalam memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan dana BOS dan BOP di tingkat satuan pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil wawancara dengan bendahara BOS dan kepala sekolah menunjukkan bahwa dana BOS yang diterima SMA Negeri 12 Semarang mencapai sekitar Rp1,2 miliar per tahun yang disalurkan dalam dua tahap oleh pemerintah pusat melalui mekanisme transfer langsung ke rekening sekolah. Dana ini dialokasikan untuk berbagai keperluan operasional seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK), pembayaran operasional listrik dan internet, pelatihan guru, serta pengembangan kegiatan pembelajaran. Penyusunan anggaran dilakukan melalui RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang dirancang bersama antara kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah memprioritaskan pengeluaran berdasarkan kebutuhan utama, dan setiap transaksi dicatat serta dilaporkan menggunakan aplikasi ARKAS. Sistem ini mendukung pelaporan yang cepat dan sesuai standar akuntabilitas pendidikan.

Pelaporan dana BOS dilakukan setiap akhir tahap penyaluran, dan menjadi syarat untuk pencairan dana tahap berikutnya. Evaluasi dilakukan secara internal melalui rapat manajemen sekolah serta pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat dan pengawas pembina. Dalam proses ini, pihak sekolah menekankan pentingnya transparansi anggaran, dengan membuka informasi penggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi dan rapat komite. Meskipun BOS sangat membantu operasional, sekolah masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi program-program pengembangan seperti kegiatan ekstrakurikuler dan program yang mengangkat inovasi digital. Tantangan lain yang muncul adalah keterlambatan pencairan dana yang menyebabkan beberapa rencana harus ditunda sementara. Untuk mengatasi hal ini, sekolah menggunakan dana kas kecil atau berkoordinasi dengan komite sekolah agar program tetap berjalan.

Dana BOP di SMA Negeri 12 Semarang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan diperuntukkan secara eksklusif untuk membayar honorarium guru tidak tetap (GTT) serta tenaga non-ASN lainnya. Tidak seperti BOS yang lebih fleksibel, BOP memiliki ketentuan penggunaan yang sangat ketat dan hanya dapat digunakan untuk jenis

## **OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA BOS DAN BOP DI SMA NEGERI 12 SEMARANG**

perbelanjaan tertentu yang telah ditetapkan dalam panduan juknis. Sekolah tidak diperbolehkan menggunakan BOP untuk pembelian alat, kegiatan siswa, maupun pengembangan sarana prasarana. Proses pengajuan dan pencairan dilakukan berdasarkan jumlah siswa dan karakteristik sekolah, dengan verifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi. Sekolah menyusun perencanaan BOP secara kolektif dengan melibatkan tim sarana prasarana, kurikulum, dan kesiswaan, lalu melaporkannya menggunakan aplikasi SIMDAK BOP. Laporan disusun minimal dua kali dalam setahun dan harus sesuai dengan rencana awal agar dana tahap selanjutnya dapat dicairkan.

Kendala utama dalam pengelolaan BOP adalah keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana, yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan aktual sekolah. Kebutuhan seperti perangkat lunak, pelatihan untuk guru non-ASN, atau perawatan sarana yang rusak berat tidak dapat dibiayai oleh BOP. Sekolah juga tidak memiliki dana cadangan BOP sehingga jika terjadi keterlambatan pencairan, operasional terganggu. Berdasarkan hasil wawancara, sekolah belum menerima bantuan dana CSR dari perusahaan swasta atau lembaga lain, dan tidak memiliki unit usaha mandiri. Meski begitu, upaya optimalisasi tetap dilakukan, seperti efisiensi pembayaran honor, dokumentasi yang disiplin, dan keterlibatan aktif komite sekolah sebagai pengawas penggunaan dana. Pelaporan dilakukan dengan standar dokumentasi ketat, termasuk bukti transfer dana dan kuitansi yang disimpan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Secara umum, SMA Negeri 12 Semarang menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam mengelola dua skema pendanaan yang berbeda secara fungsi dan regulasi. Sekolah berupaya mengintegrasikan proses manajerial melalui pelibatan semua unsur sekolah, memperkuat transparansi melalui laporan daring, serta melakukan efisiensi anggaran dalam menghadapi keterbatasan dana. Dalam wawancara, pihak sekolah menyampaikan bahwa pengembangan kapasitas digital bagi operator serta pendampingan teknis dari dinas sangat dibutuhkan, mengingat sistem berbasis aplikasi menuntut ketelitian dan kompetensi tinggi. Selain itu, sekolah juga telah menyusun strategi jangka panjang dengan menjajaki potensi kemitraan dengan alumni atau lembaga masyarakat sebagai solusi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan. Dalam konteks kebijakan pendidikan yang dinamis, kemampuan sekolah untuk menyesuaikan diri dan merespon kebutuhan lokal menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan pengelolaan dana pendidikan yang efisien dan akuntabel.

Setelah dipaparkan hasil temuan dari lapangan terkait pengelolaan dana BOS dan BOP di SMA Negeri 12 Semarang, bagian berikut akan mengulas temuan tersebut secara lebih mendalam melalui pembahasan tematik yang disusun berdasarkan fokus utama penelitian. Pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan data lapangan dalam bingkai teori dan studi sebelumnya, serta mengevaluasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Terdapat empat aspek utama yang dibahas secara bertahap, yaitu optimalisasi penggunaan dana terhadap kualitas layanan pendidikan, kapasitas manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan anggaran, transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan, serta tantangan implementasi juknis dalam konteks kebutuhan riil sekolah. Pembahasan ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dan mendukung atau merevisi hipotesis awal berdasarkan temuan empiris yang telah diperoleh.

### **1. Optimalisasi Dana BOS dan BOP terhadap Kualitas Layanan Pendidikan**

Optimalisasi dana BOS dan BOP di SMA Negeri 12 Semarang menjadi faktor penting dalam menunjang mutu layanan pendidikan. Pemanfaatan dana BOS difokuskan pada penyediaan sarana prasarana pendidikan seperti LCD, komputer, alat peraga, serta pelatihan guru. Sementara dana BOP diarahkan secara eksklusif untuk pembayaran honorarium guru tidak tetap (GTT), menjamin keberlanjutan pengajaran bagi siswa yang ditangani oleh tenaga non-ASN. Perencanaan anggaran dilakukan bersama oleh tim manajemen sekolah melalui RKAS, yang disusun berdasarkan kebutuhan prioritas siswa dan guru. Proses ini memperlihatkan adanya sinkronisasi antara strategi penggunaan dana dan kebutuhan operasional harian pendidikan, sebuah langkah dalam mengoptimalkan kinerja sekolah yang sepenuhnya bergantung pada pembiayaan dari pemerintah.

Kualitas layanan pendidikan diukur melalui ketercukupan fasilitas, kompetensi guru, dan pelaksanaan pembelajaran yang bermakna. Dalam konteks ini, keterpaduan dana BOS dan BOP memperkuat struktur dasar pelayanan pendidikan tanpa membebani orang tua siswa. Dana BOS digunakan secara fleksibel untuk kegiatan belajar-mengajar, sementara dana BOP mengisi celah dalam penggajian guru non-PNS. Alokasi anggaran yang terintegrasi ini mendukung terjadinya stabilitas pengajaran dan mencegah disrupti layanan akibat keterbatasan sumber daya manusia. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa optimalisasi dana pendidikan bukan

# **OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA BOS DAN BOP DI SMA NEGERI 12 SEMARANG**

semata masalah teknis administratif, tetapi juga bagian dari strategi mutu sekolah yang berkelanjutan.

Analisis terhadap praktik ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penggunaan anggaran yang adaptif terhadap kebutuhan nyata merupakan wujud konkret dari manajemen berbasis mutu. Menurut Ishak et al. (2024), penguatan mutu pendidikan di era Society 5.0 menuntut fleksibilitas dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya, termasuk keuangan. SMA Negeri 12 Semarang telah menunjukkan bagaimana dana BOS dan BOP dapat dimaksimalkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, sekaligus mempertahankan efisiensi anggaran. Tidak hanya terbatas pada penyediaan alat atau pelatihan, penggunaan dana tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan responsif terhadap dinamika kebijakan.

Senada dengan itu, Munirom (2021) menekankan pentingnya manajemen peningkatan mutu yang bersifat sistemik dan berbasis kebutuhan sekolah. Dalam kasus SMA Negeri 12 Semarang, perencanaan BOS dan BOP dilakukan secara kolektif dan partisipatif, menjadikan proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari peningkatan mutu. Hasilnya adalah peningkatan efektivitas penggunaan dana serta keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak langsung pada proses pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki sisi teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga mendorong transformasi manajerial yang mendukung kemajuan sekolah secara lebih menyeluruh.

## **2. Kapasitas Manajerial dalam Pengelolaan Dana Pendidikan**

Kapasitas manajerial menjadi penentu utama dalam keberhasilan pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Kepala sekolah dan bendahara berperan sebagai aktor kunci yang mengoordinasikan seluruh proses pengelolaan dana pendidikan yang dimulai dari proses penyusunan anggaran, pengajuan, realisasi, hingga pelaporan dana BOS dan BOP. Di SMA Negeri 12 Semarang, kepala sekolah berperan strategis dalam merancang struktur perencanaan keuangan berbasis kebutuhan aktual dan mempertimbangkan prioritas pembelajaran. Tidak hanya mengelola, tetapi juga mengarahkan penggunaan dana secara lebih efektif, kepala sekolah memastikan

setiap kegiatan atau kebutuhan yang dibiayai mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan.

Kinerja manajerial tersebut diperkuat dengan dukungan dari pegawai bendahara BOS yang memahami regulasi dan tata kelola keuangan berbasis aplikasi ARKAS dan SIMDAK BOP dalam sistem. Dalam praktiknya, bendahara tidak hanya bertugas sebagai administrator keuangan, tetapi juga sebagai mediator antara kebutuhan lapangan dan batasan teknis anggaran. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui forum manajemen atau rapat dialogis, sehingga munculnya distribusi tanggung jawab yang merata dalam penentuan prioritas pembiayaan. Bentuk kolaborasi ini menunjukkan bahwa kapasitas manajerial bukan hanya tentang kepemimpinan individu, tetapi juga tentang bagaimana kemampuan membangun sinergi antarunit di sekolah.

Dalam konteks ini, Nurahmawati et al. (2023) menggarisbawahi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS merupakan indikator penting dari kemampuan manajerial yang efektif. Kepala sekolah yang aktif menciptakan ruang dialog dan berani menyusun strategi keuangan dapat mendorong kemajuan signifikan dalam mutu layanan. SMA Negeri 12 Semarang menunjukkan adanya penguatan fungsi kepemimpinan yang tidak hanya administratif, tetapi juga transformatif, yaitu mampu merespon dinamika kebutuhan siswa dan guru secara langsung dalam keputusan keuangan.

Septhiningrum et al. (2023) menambahkan bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS sangat ditentukan oleh penguasaan kepala sekolah terhadap kebijakan dan kapasitas organisasi. Tanpa pemahaman mendalam terhadap juknis serta kemampuan manajerial, dana BOS dan BOP rentan disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. SMA Negeri 12 menunjukkan bagaimana manajemen keuangan yang kuat mampu meminimalisir risiko birokrasi dan memaksimalkan peluang dari setiap dana yang diterima. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bahwa kapasitas manajerial sekolah adalah faktor krusial dalam menjamin berjalannya strategi pembiayaan pendidikan secara efektif.

### **3. Transparansi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan**

Transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi aspek fundamental dalam membangun kepercayaan publik terhadap sekolah, terutama di era di mana

## **OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA BOS DAN BOP DI SMA NEGERI 12 SEMARANG**

akses informasi sangat terbuka. Di SMA Negeri 12 Semarang, transparansi diwujudkan melalui mekanisme pelaporan daring menggunakan aplikasi ARKAS untuk BOS dan SIMDAK BOP untuk dana pendamping dari pemerintah daerah. Kedua sistem ini memungkinkan pencatatan dan pelaporan dilakukan secara real time dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang berkepentingan. Komite sekolah turut dilibatkan dalam pemantauan anggaran, baik melalui forum pertemuan rutin maupun papan informasi yang menampilkan realisasi penggunaan dana. Partisipasi aktif dari komite sekolah menjadi kekuatan pengawasan moral sekaligus media komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan pendidikan.

Keikutsertaan pihak komite sekolah dan pihak orang tua dalam memahami arah penggunaan dana juga memperkuat fungsi pengawasan eksternal yang sangat dibutuhkan dalam mengelola dana publik. SMA Negeri 12 tidak memungut biaya dari siswa, sehingga hampir seluruh pembiayaan bersumber dari BOS dan BOP. Dalam situasi seperti ini, legitimasi publik terhadap alokasi dan penggunaan anggaran menjadi sangat penting. Partisipasi dalam rapat anggaran dan keterlibatan dalam verifikasi RKAS menjadi bentuk nyata partisipasi komunitas sekolah. Ketika masyarakat mengetahui dan turut menyetujui peruntukan anggaran, resistensi atau ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana publik dapat ditekan. Hal ini akan menciptakan sinergi yang positif antara pihak manajemen sekolah dengan masyarakat pendidikan di sekitarnya.

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017), pengelolaan dana publik dalam sektor pendidikan harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan potensi terjadi penyimpangan. Proses pelaporan dan pencatatan keuangan yang terbuka memperkuat fondasi akuntansi pemerintahan yang sehat, termasuk dalam konteks sekolah sebagai satuan kerja yang dibiayai negara. Praktik di SMA Negeri 12 Semarang memperlihatkan bagaimana nilai transparansi itu diinstitutionalisasi dalam sistem pelaporan dan dialog antar pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong keterbukaan informasi publik dalam setiap sektor pelayanan, termasuk pendidikan dasar dan menengah pada institusi formal.

Lebih lanjut, Hidayat et al. (2019) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana BOS secara langsung berdampak pada peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sekolah. Dalam studi mereka, keterlibatan pemangku kepentingan menjadi faktor penguat dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional dan kontekstual. SMA Negeri 12 Semarang menunjukkan kecenderungan serupa, di mana proses penganggaran dilakukan secara kolektif, mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, serta diawasi oleh komite dan pengawas eksternal. Dengan sistem ini, sekolah tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun legitimasi sosial yang menjadi kunci keberlanjutan tata kelola pendidikan yang sehat.

#### **4. Kendala Implementasi Juknis dan Penyesuaian di Lapangan**

Meskipun secara administratif pengelolaan dana BOS dan BOP di SMA Negeri 12 Semarang tergolong baik, beberapa tantangan lainnya tetap muncul dalam implementasi petunjuk teknis (juknis) yang sering kali tidak selaras dengan kebutuhan riil sekolah. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pencairan dana dari pusat maupun daerah yang mengakibatkan sekolah harus menunda sejumlah program yang telah direncanakan. Dalam kondisi darurat ini, pihak sekolah biasanya mengandalkan dana kas kecil atau mencari solusi melalui pembiayaan sementara dari komite sekolah. Ketidaksesuaian waktu pencairan dengan kalender akademik menyebabkan inefisiensi, karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu atau harus dirancang ulang untuk menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia.

Selain masalah teknis pencairan, regulasi penggunaan dana yang terlalu kaku juga menjadi hambatan dalam realisasi tujuan inovasi sekolah. Dana BOS dan BOP memiliki ketentuan yang sangat spesifik, sehingga sekolah tidak memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan aktual di lapangan. Misalnya, ketika kebutuhan siswa berkembang ke arah penguatan literasi digital, dana BOS belum sepenuhnya dapat digunakan untuk membiayai perangkat atau langganan platform pembelajaran daring tertentu. Dalam praktiknya, sekolah sering kali harus menyesuaikan kebijakan pusat yang sifatnya universal dengan kondisi lokal yang sangat kontekstual. Ini menjadi dilema tersendiri bagi pihak

## **OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA BOS DAN BOP DI SMA NEGERI 12 SEMARANG**

sekolah yang harus menjaga kepatuhan administratif namun juga ingin responsif terhadap kebutuhan siswa yang terus berkembang.

Penelitian Mogot (2023) menunjukkan bahwa kekakuan dalam juknis dana BOS dapat menghambat kreativitas kepala sekolah dalam merancang program pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks SMA Negeri 12 Semarang, kendala serupa juga terjadi, terutama dalam aspek pemeliharaan prasarana dan peningkatan kompetensi guru non-ASN yang tidak dapat dibiayai secara fleksibel dari satu jenis dana saja. Pengelolaan dana yang terpisah antara BOS dan BOP justru menciptakan fragmentasi dalam perencanaan yang seharusnya bersifat integratif. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang mendalam dan kebijakan lokal yang memungkinkan sekolah menyesuaikan kebijakan teknis dengan kenyataan lapangan.

Sumual dan Funan (2024) menekankan pentingnya peran dana BOS dalam mendorong inovasi pendidikan dan peningkatan prestasi siswa di sekolah. Namun dalam proses implementasinya, hal itu baru dapat tercapai sekiranya sekolah diberi ruang dan peluang untuk berinovasi dan menyesuaikan strategi pembiayaan dengan kebutuhan spesifik dari satuan pendidikan. SMA Negeri 12 Semarang mengatasi tantangan ini dengan merancang strategi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk menjajaki kemitraan dengan alumni atau lembaga swasta sebagai langkah alternatif pembiayaan. Meskipun belum optimal, langkah ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki potensi adaptasi yang tinggi terhadap perubahan kebijakan dan dinamika kebutuhan siswa, asalkan diberikan keleluasaan dan pendampingan teknis yang memadai.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Studi kasus di SMA Negeri 12 Semarang menunjukkan bahwa optimalisasi pembiayaan pendidikan melalui dana BOS dan BOP dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan akuntabilitas sekolah. Integrasi kedua skema pendanaan ini memungkinkan sekolah untuk memenuhi kebutuhan operasional dasar, seperti pengadaan sarana prasarana, kegiatan pembelajaran, dan honorarium guru tidak tetap. Namun, fleksibilitas dana yang terbatas dan dukungan eksternal yang minim menjadi tantangan utama. Transparansi pelaporan melalui aplikasi ARKAS dan SIMDAK BOP, serta keterlibatan

komite sekolah, menjadi kunci dalam memperkuat akuntabilitas. Secara kritis, praktik tata kelola keuangan yang adaptif dan inovatif membuka peluang untuk peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan temuan studi kasus ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan optimalisasi pembiayaan pendidikan di masa depan. Pemerintah perlu memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam penggunaan dana BOS dan BOP, sehingga sekolah dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Sekolah juga perlu menjalin kemitraan dengan alumni, komunitas lokal, dan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam pengembangan program pendidikan yang inovatif dan kreatif. Selain itu, sekolah perlu meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis SDM pengelola dana, terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu menyederhanakan proses pelaporan dana BOS dan BOP, serta memastikan adanya sinkronisasi antara jumlah dana yang diterima dengan kebutuhan riil sekolah. Terakhir, sekolah perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas penggunaan dana BOS dan BOP dalam meningkatkan mutu pembelajaran, serta mempublikasikan laporan dana secara transparan kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam lingkup studi kasus tunggal, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan melibatkan beberapa sekolah dengan karakteristik yang berbeda, serta mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti kondisi sosial-ekonomi dan geografis. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan optimalisasi pembiayaan pendidikan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di Indonesia.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

# OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DANA BOS DAN BOP DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

## DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z., & Santoso, H. (2019). Manajemen keuangan sekolah dalam era digital: Studi kasus pengelolaan dana BOS. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 7(2), 45-58.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods* (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dewi, R. K., & Wijaya, A. (2020). Transparansi penggunaan dana BOS dan peran teknologi informasi di sekolah menengah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(1), 23-35. <https://doi.org/10.5678/jap.v13i1.789>
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Hidayat, R., Burhan, M. R., & Ma'ruf, A. (2019). Efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 93-107. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1269>
- Ishak, I., Patimah, S., Warisno, A., & Murtafiah, N. H. (2024). Pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam menuju era Society 5.0. *Journal on Education*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.5381>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman teknis pengelolaan dana BOS*. Jakarta: Kemendikbud. <https://bos.kemdikbud.go.id>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Mogot, T. F. (2023). Analisis pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Sidoarjo (Smanor). *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 617-624. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.132>
- Munirom, A. (2021). Manajemen peningkatan mutu pendidikan. *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 7(01), Article 01.

- Nugroho, T., & Lestari, D. (2022). Literasi digital bagi pengelola sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(3), 112-126. <https://doi.org/10.2345/jtp.v15i3.456>
- Nurahmawati, N., Umar, U., & Subari, S. (2023). Inovasi kepala sekolah pada pemanfaatan dana BOS. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.54371/ainj.v4i3.303>
- Prasetya, B., & Sari, M. (2023). Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18(4), 78-90. <https://doi.org/10.3456/jip.v18i4.987>
- Rahmawati, F. (2024). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas penggunaan dana BOS dan BOP. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 21(1), 59-72. <https://doi.org/10.6789/jmp.v21i1.321>
- Septhiningrum, A. P., Sumtaky, M., & Zuhroh, D. (2023). Analisis efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.09>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumual, S. D. M., & Funan, F. (2024). Peran Dana BOS dalam mendorong inovasi pendidikan dan peningkatan prestasi siswa di SD YPPK St. Petrus Yarat Konya Kabupaten Maybrat. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(2), Article 2. <https://journalpedia.com/1/index.php/jip/article/view/1415>
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Yuliana, S. (2018). Sinergi sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dana pendidikan: Pendekatan partisipatif. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(2), 150-164. <https://doi.org/10.4567/jpk.v10i2.456>